

**EFEKTIVITAS PROGRAM PENGEMBANGAN BP3K
SEBAGAI MODEL *CENTER OF EXCELENCE (CoE)* DALAM PENINGKATAN KINERJA
PENYULUH DI KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

*(The Effectiveness of BP3K Development Program As Center of Excellence (CoE) Model Toward Raising of
Extensions Performance in BP3K of Batanghari Subdistrict of East Lampung Regency)*

Fitriansyah Bakti Praja, Sumaryo Gitosaputro, Indah Listiana

Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No.1
Bandar Lampung 35145, e-mail: fbakti_praja@yahoo.com

ABSTRACT

This research aims to know: the level of extensions performance before and after BP3K development program as CoE model, the effectiveness of BP3K development program as CoE model in rising of extensions' performances, and the relating factors to extensions performance of BP3K as CoE model in Batanghari Subdistrict of East Lampung Regency. This research was conducted in 14 villages as the patronage regions in Batanghari Subdistrict from September until October 2013. The samples were 11 agricultural extension workers and 88 patronage farmers chosen by proportional random sampling from two most active farmer groups. The research data was analyzed by descriptive qualitative method and rank spearman analysis. The result showed that the increasing level of extensions' performances in BP3K of Batanghari Subdistrict before and after CoE program were increasing in arranging elucidation program, increasing in excellent agribusiness productivity in its own region, and up to now the extensions have been applying cyber extensions for helping the extensions activity. The effectiveness of CoE program in raising the extensions performance in BP3K of Batanghari Subdistrict was effective enough. The factors that significant with extensions performance were extension experiences, extension incomes, and formal education.

Key words: CoE program, effectiveness, extension, farmer, performance

PENDAHULUAN

Prioritas pembangunan di Indonesia terletak pada pembangunan bidang ekonomi dengan lebih difokuskan di sektor pertanian, karena sektor pertanian yang berhasil merupakan prasyarat bagi pembangunan sektor industri dan jasa. Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan industri dalam negeri, meningkatkan ekspor, meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja dan mendorong pemerataan kesempatan berusaha (Soekartawi 2003). Keberhasilan pembangunan pertanian tidak semata-mata ditentukan kondisi sumberdaya alam, tetapi juga ditentukan oleh peran penyuluh. Peran penyuluh pertanian sangat strategis untuk meningkatkan kualitas sumberdaya petani. Kegiatan penyuluhan tersebut memerlukan SDM yang dapat menguasai, memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan sumberdaya pertanian secara berkelanjutan. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan adanya peran penyuluhan pertanian. Peran penyuluhan pertanian pada masa orde baru hanya

sebagai alat pemerintah dalam menyebarluaskan informasi pertanian, sehingga pada tahun 1984 terwujud swasembada beras. Pada saat itu penyuluhan pertanian sangat diperhatikan dan dinilai sukses mengantarkan swasembada beras pada tahun 1984.

Awal masa reformasi, kegiatan penyuluhan pertanian mengalami masa yang suram terutama dengan perubahan kelembagaan penyuluhan dengan keluarnya undang-undang otonomi daerah yang secara langsung berdampak pada kinerja penyuluh pertanian. Tahun 2006 keluarlah Undang-undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menegaskan bahwa penyuluh pertanian mempunyai peran strategis untuk memajukan pertanian di Indonesia (Deptan 2007). Undang-undang Nomor 16 tahun 2006 secara khusus mengamanatkan upaya-upaya untuk meningkatkan mutu dan kinerja penyuluh di Indonesia. Belum optimalnya peranan penyuluhan dapat disebabkan oleh rendahnya tingkat partisipasi petani terhadap penyuluhan pertanian sebagai akibat rendahnya mutu pelayanan penyuluhan (Rasyid 2001). Selain

itu, sistem pendanaan yang lemah dan tidak sistematis, menjadi salah satu penyebab rendahnya kinerja penyuluh dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka meningkatkan kinerja penyuluh pertanian di Provinsi Lampung, maka Fakultas Pertanian Universitas Lampung bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Lampung dalam program "Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) dalam Mengentaskan Kemiskinan di Provinsi Lampung melalui Pilot Project Pengembangan BPP/BP3K sebagai *Center of Excellence (CoE)*". Program BP3K model *CoE* merupakan rangkaian dari kegiatan "Program Revitalisasi Pertanian menuju Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung", yang merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Kegiatan *CoE* ini bertujuan untuk mempertemukan antara pihak pemerintah (Dinas Teknis terkait), Perguruan tinggi, Pengusaha/Industri/Perbankan, dan Masyarakat (kelompok tani). Dengan kata lain, *CoE* dapat menjembatani berbagai kesenjangan yang sering terjadi selama ini. Hal ini terjadi karena adanya interaksi yang intensif antara komponen tersebut yang diharapkan dapat menemukan solusi terhadap berbagai masalah yang dihadapi dalam implementasi program di lapangan.

Salah satu kegiatan yang dilakukan pada program *CoE* yaitu pelatihan penerapan *cyber extension* di BP3K Kecamatan Batanghari. Setelah semua kegiatan terlaksana, pemerintah dan instansi terkait seperti BAKORLUH dan dinas pertanian akan melakukan evaluasi mengenai semua kegiatan program pengembangan BP3K sebagai model *CoE* dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berhasil tidaknya program *CoE* dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan tidak dapat terlepas dari peran penyuluh. Pelaksanaan program pengembangan BP3K sebagai model *CoE* dalam proses evaluasi ini berwujud pelaporan yang mencerminkan apa yang terjadi dan berisi jawaban pertanyaan-pertanyaan di atas serta uraian bagaimana efektivitas kegiatan dalam meningkatkan kinerja penyuluh bisa terjamin dan berjalan dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan penelitian, sebagai berikut : (1) bagaimana tingkat kinerja penyuluh di BP3K Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur sebelum dan setelah adanya program pengembangan BP3K sebagai model *CoE*? (2)

bagaimana efektivitas program pengembangan BP3K sebagai model *CoE* dalam peningkatan kinerja penyuluh di BP3K Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur ? (3) faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan peningkatan kinerja penyuluh di BP3K model *CoE* Kecamatan Batanghari?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: tingkat kinerja penyuluh di BP3K Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur sebelum dan setelah adanya program pengembangan BP3K sebagai model *CoE*, efektivitas program pengembangan BP3K sebagai model *CoE* dalam peningkatan kinerja penyuluh di BP3K Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, dan faktor-faktor yang berhubungan dengan peningkatan kinerja penyuluh di BP3K model *CoE* Kecamatan Batanghari.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian dipilih secara sengaja (*purposive*) di BP3K Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Hal ini dikarenakan BP3K Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu BP3K model *CoE* yang telah terpilih kembali pada tahun 2012 untuk dijadikan sebagai BP3K model yang akan difasilitasi di Kabupaten Lampung Timur. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan responden menggunakan kuesioner yang telah dipersiapkan. Data sekunder diperoleh dari dinas dan instansi yang terkait dengan penelitian.

Responden dalam penelitian ini adalah penyuluh pertanian di Kecamatan Batanghari sebanyak 11 orang dan sebagai pembanding digunakan sampel petani binaan penyuluh yang diambil dari 2 kelompok tani paling aktif di setiap desa, sehingga didapatkan jumlah sampel sebanyak 88 petani yang diambil dengan menggunakan teori *proportional random sampling* menggunakan rumus Yamane (1967) dalam Rahmat (2002), yaitu:

$$n = \frac{N}{Nd^2 + 1} \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan :

- n = Jumlah sampel
- N = Jumlah anggota dalam populasi (526)
- d = Derajat penyimpangan (10%)

Kemudian dari jumlah sampel tersebut, dapat ditentukan alokasi proporsi sampel untuk masing-masing wilayah binaan dengan menggunakan rumus alokasi proporsional (Nasir 1998), yaitu :

$$n_i = \left[\frac{N_i}{N} \right] \cdot n \dots\dots\dots (2)$$

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas Program *CoE* terhadap peningkatan kinerja penyuluh di BP3K Kecamatan Batanghari. Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan yang nyata antara variabel jarak tempat tinggal penyuluh dengan tempat bertugas, pengalaman, pendapatan, pendidikan formal dan peningkatan kualitas SDM penyuluh BP3K Kecamatan Batanghari dengan variabel peningkatan kinerja penyuluh yang diukur berdasarkan 10 indikator sebagai berikut : (1) tersusunnya program penyuluhan, (2) tersusunnya Rencana Kerja Tahunan (RKT) penyuluh pertanian, (3) tersusunnya peta wilayah komoditas unggulan spesifik lokasi, (4) tersebarnya informasi teknologi pertanian secara merata, (5) tumbuh kembangnya keberdayaan dan kemandirian petani, (6) terwujudnya kemitraan usaha pelaku utama dan pelaku usaha yang saling menguntungkan, (7) terwujudnya akses petani ke lembaga keuangan dan penyedia sarana produksi, (8) meningkatnya produktivitas agribisnis komoditi unggulan di masing-masing wilayah kerja, (9) meningkatnya pendapatan petani di masing-masing wilayah kerja, dan (10) meningkatnya penerapan *Cyber Extension* dalam kegiatan penyuluhan. Tingkat efektivitas program *CoE* terhadap kinerja penyuluh dilihat berdasarkan penilaian dari penyuluh dan petani binaan penyuluh BP3K Kecamatan Batanghari. Pembuktian kebenaran hipotesis dilakukan dengan analisis statistik nonparametrik, yaitu analisis korelasi *Rank Spearman* dengan memanfaatkan bantuan program SPSS versi 16. Adapun rumus uji koefisien korelasi (Siegel 1986), rumus *Rank Spearman* adalah sebagai berikut :

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^n d_i^2}{n^3 - n} \dots\dots\dots (3)$$

Keterangan:

- r_s = Koefisien korelasi *Spearman*
- n = Jumlah penyuluh
- d_i = Perbedaan setiap pasangan *rank*

Rumus r_s ini digunakan atas dasar pertimbangan bahwa dalam penelitian ini akan melihat korelasi (keeratan hubungan) antara variabel bebas dan variabel terikat dari peringkat dan dibagi dalam klasifikasi tertentu. Untuk menentukan signifikansi nilai r_s nya adalah melihat tabel harga-harga kritis r_s korelasi *Rank Spearman* (Siegel 1986). Kriteria pengambilan keputusan:

1. Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka hipotesis ditolak, pada $(\alpha) = 0,05$ berarti tidak terdapat hubungan antara kedua variabel yang diuji.
2. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka hipotesis diterima, pada $(\alpha) = 0,05$ berarti terdapat hubungan antara kedua variabel yang diuji.

Selain menggunakan kriteria pengambilan keputusan di atas, maka untuk melihat hubungan antar variabel dilakukan dengan membandingkan besar kecilnya nilai signifikansi yang diperoleh dari hasil analisis menggunakan SPSS 16, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka variabel tersebut memiliki hubungan yang nyata, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka variabel tersebut tidak memiliki hubungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat kinerja Penyuluh BP3K Kecamatan Batanghari

Kinerja penyuluh adalah proses dan hasil dari pelaksanaan tugas dalam satu waktu periode tertentu, sebagai perwujudan dari interaksi antara kompetensi, motivasi dan kesempatan yang memberikan kemungkinan seorang penyuluh untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Rekapitulasi penilaian tingkat kinerja penyuluh BP3K Kecamatan Batanghari sebelum dan sesudah program *CoE* yang diukur dengan sembilan indikator menurut Deptan (2010) dan ditambah satu indikator menurut program *CoE* dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi tingkat kinerja penyuluh BP3K Kecamatan Batanghari sebelum dan sesudah *CoE*

Tingkat Kinerja Penyuluh	Klasifikasi	
	Sebelum <i>CoE</i>	Sesudah <i>CoE</i>
1. Tersusunnya program penyuluhan pertanian	Sedang	Tinggi
2. Tersusunnya Rencana Kerja Tahunan (RKT) penyuluh pertanian	Tinggi	Tinggi
3. Tersusunnya peta wilayah komoditas unggulan spesifik lokasi	Tinggi	Tinggi
4. Tersebarannya informasi teknologi pertanian secara merata	Tinggi	Tinggi
5. Tumbuh kembangnya keberdayaan dan kemandirian petani	Tinggi	Tinggi
6. Terwujudnya kemitraan usaha pelaku utama dan pelaku usaha yang saling menguntungkan	Rendah	Rendah
7. Terwujudnya akses petani ke lembaga keuangan dan penyedia sarana produksi	Tinggi	Tinggi
8. Meningkatnya produktivitas agribisnis komoditi unggulan di masing-masing wilayah kerja	Sedang	Tinggi
9. Meningkatnya pendapatan petani di masing-masing wilayah kerja	Sedang	Sedang
10. Meningkatnya penerapan <i>cyber extension</i> dalam kegiatan penyuluhan	Rendah	Sedang

Tersusunnya Program Penyuluhan Pertanian

Programa penyuluhan pertanian adalah pernyataan tertulis tentang keadaan, masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan yang disusun penyuluh dalam bentuk dan sistematika yang teratur. Programa penyuluhan pertanian dapat dihasilkan melalui proses perencanaan program yang diorganisasikan secara sadar dan terus menerus, untuk memilih alternatif yang terbaik dalam mencapai tujuan dari penyuluhan pertanian. Penilaian kinerja penyuluh untuk tersusunnya program penyuluhan pertanian sebelum program *CoE* termasuk dalam klasifikasi sedang dan sesudah program *CoE* masuk dalam klasifikasi tinggi. Perbedaan penilaian kinerja penyuluh sebelum dan sesudah adanya program *CoE*, karena pada saat belum berjalannya program *CoE* tidak semua anggota kelompok tani ikutserta dalam menyusun program penyuluhan pertanian. Penyuluh biasanya hanya berkoordinasi dengan pengurus kelompok tani dalam menyusun program, sehingga pengetahuan petani tentang kinerja penyuluh dalam menyusun program

sebelum program *CoE* belum cukup baik dan masuk dalam klasifikasi sedang.

Tersusunnya Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Rencana kerja penyuluh pertanian adalah pernyataan tertulis yang secara rutin memuat secara lengkap tentang apa, mengapa, bagaimana, siapa, bilamana, dimana, dan berapa biaya yang diperlukan untuk melakukan kegiatan penyuluhan. Penilaian kinerja penyuluh dalam menyusun RKT sebelum dan sesudah program *CoE* termasuk dalam klasifikasi tinggi.

Tingkat kinerja penyuluh dalam menyusun RKT sebelum dan sesudah adanya program *CoE* sama-sama masuk dalam klasifikasi tinggi. Penyuluh telah membuat pembaharuan RKT secara rutin setiap tahunnya dengan cara meninjau dan bermusyawarah dengan anggota kelompok tani binaan tentang masalah yang saat ini dihadapi dan hal-hal yang dibutuhkan oleh anggota kelompok tani untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kurun waktu satu tahun yang akan datang.

Tersusunnya Peta Wilayah

Peta wilayah adalah suatu gambaran dari permukaan bumi dengan menggunakan skala tertentu pada bidang datar. Peta wilayah yang dibuat mengacu pada peta-peta topografi yang berfungsi sebagai peta dasar dan terdiri tentang keterangan-keterangan batas desa, jalan, pemukiman penduduk, kalender musim dan data potensi sumberdaya/komoditas yang ada di wilayah tersebut.

Kinerja penyuluh dalam menyusun peta wilayah untuk pengembangan spesifikasi lokasi sebelum dan sesudah program *CoE* masuk dalam klasifikasi tinggi, karena penyuluh dalam menyusun peta wilayah untuk pengembangan teknologi spesifik lokasi sering berkoordinasi dengan kelompok tani maupun dengan aparat desa untuk mencari data wilayah binaan, sehingga peta wilayah yang dibuat penyuluh untuk mengembangkan teknologi spesifik lokasi sudah sesuai dengan potensi wilayah binaannya. Peta wilayah juga diperbaharui secara rutin setiap tahun berdasarkan data luas lahan, produksi, produktivitas serta data mengenai jumlah petani yang mengusahakan komoditas tertentu, sehingga pada akhirnya peta tersebut dapat sesuai dengan kondisi wilayah binaan penyuluh.

Tersebarnya Informasi Teknologi Pertanian

Peran teknologi dalam sektor pertanian sangat diperlukan untuk keberhasilan produktivitas usaha tani yang dihasilkan. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, otomatis kebutuhan akan sandang, pangan dan papan akan semakin meningkat. Penyuluh memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan informasi teknologi pertanian kepada petani, informasi yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan petani dan keadaan wilayah pertanian. Informasi teknologi pertanian yang disampaikan penyuluh dirasakan petani telah tersebar merata. Penyuluh dalam menyampaikan informasi tidak hanya pada saat musyawarah, melainkan datang langsung kepada petani dan memberikan pengarahan dan mempraktekkan informasi terbaru kepada petani. Oleh sebab itu, kinerja penyuluh sebelum dan sesudah program *CoE* sama-sama masuk dalam klasifikasi tinggi.

Tumbuh Kembangnya Keberdayaan dan Kemandirian Petani

Penilaian kinerja penyuluh untuk tumbuh-kembangnya keberdayaan dan kemandirian petani sebelum dan sesudah program *CoE* sama-sama berada pada klasifikasi tinggi, karena penyuluh selalu berusaha agar petani tidak selamanya tergantung pada penyuluh dalam mencari sarana produksi, permodalan serta pemasaran produk hasil pertanian. Hal ini terlihat dari semakin baiknya koordinasi yang dilakukan penyuluh dan petani dalam pemenuhan sarana produksi seperti pupuk dan obat-obatan yang diperlukan telah dapat dikoodinir dengan baik oleh pengurus kelompok tani yang ada di wilayah binaan masing masing penyuluh, sehingga petani tidak lagi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan bercocok tanam. Pemasaran hasil produksi juga sudah mulai terlihat bahwa petani sudah mulai bisa memasarkan sendiri hasil produksi mereka, sehingga mereka tidak perlu sering bertanya kepada penyuluh mengenai informasi tempat pemasaran produknya lagi.

Terwujudnya Kemitraan antara Petani dan Pelaku Usaha

Kemitraan usaha tani merupakan suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan di antara pengusaha dan petani. Pola kemitraan ini dapat berupa dalam hal pembiayaan, penyediaan sarana dan prasarana pertanian maupun dalam hal pemasaran hasil pertanian. Penilaian kinerja penyuluh dalam dalam mewujudkan terjalinnya kemitraan usaha antara pelaku utama atau petani

dengan pelaku usaha yang saling menguntungkan sebelum dan sesudah program *CoE* berada pada klasifikasi rendah.

Petani merasa takut melakukan kemitraan, karena biasanya sarana produksi seperti bibit yang diberikan oleh perusahaan tidak sesuai dengan kondisi di wilayah tersebut dan berakibat pada hasil produksi yang menurun. Petani juga diwajibkan untuk menjual hasil produksi kepada perusahaan mitranya dengan harga yang di bawah harga pasar, sehingga pada akhirnya petani malas untuk menjali kemitraan yang disediakan penyuluh.

Terwujudnya Akses Petani ke Lembaga Keuangan dan Penyedia Sarana Produksi

Kinerja penyuluh dalam mewujudkan akses petani kelembaga keuangan dan penyedia sarana produksi sebelum dan setelah adanya program *CoE* masuk dalam klasifikasi tinggi, karena penyuluh sudah memiliki peran aktif dalam memfasilitasi petani untuk menggunakan jasa lembaga keuangan seperti bank, koperasi, dan lembaga keuangan mikro pedesaan (LKMP) untuk pemenuhan modal produksi. Penyuluh akan menunjukkan dan mendampingi petani dalam menggunakan akses ke lembaga keuangan dan berusaha membantu anggota kelompok tani dalam mendirikan lembaga keuangan maupun lembaga penyedia sarana produksi di daerah wilayah binaannya.

Meningkatnya Produktivitas

Penilaian kinerja penyuluh untuk meningkatkan produktivitas komoditas yang diusahakan petani sebelum program *CoE* berada pada klasifikasi sedang dan setelah program *CoE* berada pada klasifikasi tinggi. Hal ini dapat dilihat dari peran penyuluh dalam meningkatkan produktivitas agribisnis unggulan di daerah binaannya yaitu dengan melaksanakan kaji terap, mengembangkan model usahatani, menemukan cara baru pengendalian hama dan penyakit tanaman, serta merekomendasikan teknologi baru kepada petani yang pada akhirnya petani merasa bahwa produktivitas tanaman mereka mengalami kenaikan rata-rata 10% dari musim panen sebelumnya.

Meningkatnya Pendapatan Petani

Kinerja penyuluh dalam meningkatkan pendapatan petani sebelum dan setelah adanya program *CoE* berada pada klasifikasi sedang, karena hasil

produksi yang diperoleh petani yang tidak menentu pada setiap musim panennya. Berbagai penyakit seperti serangan hama wereng dan penyakit patah leher merupakan gangguan produksi yang paling banyak ditemui oleh petani di lapangan, sehingga berdampak pada rendahnya hasil panen yang merupakan sumber utama pendapatan petani. Berbagai penyuluhan mengenai pola tanam dan pengendalian hama yang baik juga terus dilakukan oleh salah satunya dengan menerapkan sistem tanam jarak legowo yang dianggap akan dapat meningkatkan hasil panen dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan petani sebesar 5-7 persen dari musim sebelumnya.

Meningkatnya Penerapan *Cyber Extension* Dalam Kegiatan Penyuluhan

Penilaian kinerja penyuluh dalam penerapan *Cyber Extension* sebelum program *CoE* berada pada klasifikasi rendah. Hal ini disebabkan pelatihan tentang pengaplikasian internet untuk penyuluh yang belum pernah diadakan. Selain itu, hampir semua petani yang kurang menguasai penggunaan komputer dan internet, sehingga dalam memperoleh informasi melalui penerapan *Cyber Extension* tidak diterima oleh petani. Setelah program *CoE*, penilaian kinerja penyuluh dalam penerapan *Cyber Extension* berada pada klasifikasi sedang, karena meskipun penyuluh telah menguasai dan ikut dalam pelatihan pengaplikasian komputer dan web yang diadakan oleh pemerintah, namun kurang memadainya fasilitas yang mendukung dalam proses pelaksanaan *Cyber extension*.

Efektivitas Program *CoE* Terhadap Peningkatan Kinerja Penyuluh di BP3K Kecamatan Batanghari

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 menerapkan konsep efektivitas sebagai ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program atau kegiatan mencapai suatu hasil dan manfaat yang diharapkan. Efektivitas pada umumnya digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam melakukan suatu aktivitas atau kegiatan. Efektivitas merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk melihat tercapainya tujuan atau program yang ditentukan (Wahab SA 1997 dalam Pebrian 2007). Semakin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.

Pengukuran tingkat efektivitas program *CoE* di BP3K Kecamatan Batanghari dilakukan untuk melihat seberapa besar keberhasilan program

tersebut dapat mempengaruhi tingkat kinerja penyuluh di BP3K Kecamatan Batanghari, sehingga nantinya dapat mencapai tujuan utama dari Program *CoE*. Program *CoE* mempunyai tujuan utama tersebut yaitu menjadikan BP3K menjadi *entry point* program atau kegiatan percepatan inovasi teknologi, sehingga dapat meningkatkan kinerja penyuluh dalam pembangunan pertanian.

Efektivitas program *CoE* di BP3K Kecamatan Batanghari dilihat dari pencapaian tujuan program *CoE* yaitu meningkatnya kinerja penyuluh pertanian. Tingkat efektivitas program *CoE* diukur berdasarkan jumlah seluruh skor dari keseluruhan indikator. Tingkat efektivitas program *CoE* dapat dilihat pada Tabel 2.

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas program *CoE* terhadap peningkatan kinerja penyuluh di BP3K Kecamatan Batanghari berada pada klasifikasi efektif yang artinya penyuluh sudah menjalankan tugasnya berdasarkan 10 indikator yang diuji dengan cukup baik.

Pengujian hipotesis

Hasil analisis korelasi *Rank Spearman* faktor faktor yang mempengaruhi kinerja penyuluh dengan kinerja penyuluh di BP3K model *CoE* Kecamatan Batanghari dapat dilihat pada Tabel 3 (terlampir).

Hubungan antara jarak tempat tinggal dengan tempat bertugas dengan kinerja penyuluh di BP3K model *CoE* Kecamatan Batanghari

Jarak tempat tinggal dengan tempat bertugas tidak memiliki hubungan dengan kinerja penyuluh di BP3K Kecamatan Batanghari. Sebaran jarak tempat tinggal dengan tempat bertugas berkisar 1 sampai 80 Km, dengan rata-rata jarak tempuh penyuluh 15,54 Km (90,90%). Ndraha (1999) menyatakan jarak tempat tinggal dapat dikategorikan dalam lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja seorang penyuluh pertanian. Penyuluh yang berdomisili dekat dengan tempat bekerja dan sering berinteraksi dengan petani peternak akan mempengaruhi kinerjanya dibandingkan apabila penyuluh jauh dari lokasi tugasnya sebagai seorang penyuluh pertanian.

Tabel 2. Tingkat efektivitas program *CoE*

Interval skor	Klasifikasi	Jumlah responden	Persentase
48,00 - 112,0	Tidak efektif	0	0,00
112,1 - 176,1	Cukup efektif	4	36,36
176,2 - 240,0	Efektif	7	63,64
Jumlah		11	100,00
Rata-rata : 180,85 (Efektif)			

Tempat tinggal penyuluh yang terlalu jauh dengan Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP) tempat penyuluh bertugas bisa menjadi penyebab penyuluh tidak mengetahui masalah masalah yang dihadapi petani, karena petani tidak bisa menceritakan masalahnya kepada penyuluh. Selain itu, penyuluh juga akan mengeluarkan biaya yang lebih besar jika jarak tempat tinggal penyuluh dengan WKPP tempat penyuluh bertugas terlalu jauh dan dapat menyebabkan keterlambatan hadir penyuluh.

Hubungan antara Pengalaman Penyuluh dengan Kinerja Penyuluh di BP3K Model *CoE* Kecamatan Batanghari

Pengalaman penyuluh dalam menjalankan pekerjaannya memiliki hubungan yang nyata terhadap kinerja penyuluh di BP3K Kecamatan Batanghari. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sastrohadiwiryono (2001) bahwa pengalaman bekerja akan banyak memberikan keahlian dan keterampilan kerja, sebaliknya terbatasnya pengalaman kerja akan mengakibatkan tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki seseorang akan semakin rendah.

Hubungan antara Pendapatan Penyuluh dengan Kinerja Penyuluh di BP3K Model *CoE* Kecamatan Batanghari

Pendapatan penyuluh memiliki hubungan yang nyata terhadap kinerja penyuluh di BP3K Kecamatan Batanghari. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Soekidjo (2003). Pendapatan/gaji yang diberikan secara tepat dan benar akan memberikan kepuasan kerja dan motivasi kepada penyuluh untuk mencapai tujuan-tujuan penyuluhan yang dilakukan. Bila kompensasi yang diberikan tidak memadai atau kurang tepat, prestasi kerja, motivasi dan kepuasan kerja pegawai akan menurun.

Hubungan antara Pendidikan Formal Penyuluh dengan Kinerja Penyuluh di BP3K Model *CoE* Kecamatan Batanghari

Pendidikan formal penyuluh memiliki hubungan yang nyata terhadap kinerja penyuluh di BP3K Kecamatan Batanghari. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Santosa (1992) bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi pula pengetahuan, sikap, keterampilan, efisiensi kerja, semakin banyak mengetahui teknik bekerja yang lebih baik dan lebih menguntungkan.

Hubungan antara Peningkatan Kapasitas SDM dengan Kinerja Penyuluh di BP3K Model *CoE* Kecamatan Batanghari

Peningkatan kapasitas SDM penyuluh tidak memiliki hubungan yang nyata terhadap kinerja penyuluh di BP3K Kecamatan Batanghari, secara teori kinerja seseorang dipengaruhi oleh kompetensi penyuluh tersebut. Seorang penyuluh yang memiliki kompetensi, misalnya di bidang teknologi informasi, tentu memiliki kinerja yang lebih baik bila mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan teknologi informasi dibandingkan dengan penyuluh yang tidak memiliki kompetensi di dalam bidang tersebut. Pelatihan dan pengembangan akan membantu penyuluh meningkatkan kompetensi mereka, sehingga seharusnya pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM memiliki hubungan dengan kinerja penyuluh. Namun, fakta di lapangan tidak menunjukkan hal yang demikian, dikarenakan semakin seringnya penyuluh mengikuti pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM, maka intensitas waktu yang dipergunakan penyuluh untuk membantu petani akan semakin berkurang.

Hubungan antara Insentif Penyuluh Dengan Kinerja Penyuluh di BP3K Model *CoE* Kecamatan Batanghari

Insentif penyuluh tidak memiliki hubungan yang nyata terhadap kinerja penyuluh di BP3K Kecamatan Batanghari. Pangabean (2002) mengemukakan bahwa insentif merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada seseorang, karena prestasi melebihi standar yang ditentukan. Dengan mengasumsikan bahwa uang dapat mendorong seseorang bekerja lebih giat lagi, maka mereka yang produktif lebih menyukai gajinya dibayarkan berdasarkan hasil kerja. Namun, fakta di lapangan menyatakan insentif tidak memiliki hubungan dengan peningkatan kinerja penyuluh,

dikarenakan insentif yang diterima penyuluh merupakan insentif yang diperoleh sebagai biaya perjalanan dinas jika mengikuti pelatihan. Selain itu juga, insentif yang diperoleh terkadang tidak berbentuk uang, melainkan berbentuk piagam penghargaan dan sebagainya.

Berdasarkan data pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa tingkat pengalaman penyuluh merupakan variabel yang memiliki nilai signifikansi paling baik yaitu sebesar 0,019 yang artinya pengalaman penyuluh memiliki hubungan yang nyata terhadap peningkatan kinerja penyuluh di BP3K Kecamatan Batanghari.

KESIMPULAN

Tingkat kinerja penyuluh di BP3K Kecamatan Batanghari, baik sebelum program *CoE* maupun setelah program *CoE*, terjadi beberapa peningkatan diantaranya terjadi peningkatan dalam penyusunan program penyuluhan, meningkatnya produktivitas agribisnis unggulan di masing-masing wilayah, serta penyuluh merasa sudah bisa menerapkan *cyber extension* untuk membantu kegiatan penyuluhan. Efektifitas program *CoE* terhadap peningkatan kinerja penyuluh di BP3K Kecamatan Batanghari berada pada klasifikasi efektif.

Faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja penyuluh di BP3K model *CoE* Kecamatan Batanghari yaitu pengalaman penyuluh, pendapatan penyuluh dan pendidikan formal penyuluh, sedangkan jarak tempat tinggal dengan tempat bertugas, peningkatan kapasitas SDM dan insentif penyuluh tidak berhubungan nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pertanian. 2007. *Undang-undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan*. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung. Bandar Lampung.
- Departemen Pertanian. 2010. *Modul Diklat Fungsional Penyuluh Pertanian Terampil*. Badan Pengembangan SDM Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Nasir M. 1998. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Ndraha T. 1999. *Pengantar Teori Pembangunan Sumber Daya Manusia*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Notoatmodjo. 2003. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Panggabean MS. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan Pertama. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Rakhmat J. 2002. *Metode Penelitian Komunikasi*. PT Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Rasyid MA. 2001. Sangat Diperlukan Kegiatan Penyuluhan Pertanian. *Ekstensi*, 13.
- Santosa S. 1992. *Dinamika Kelompok*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sastrohadiwiryono BS. 2001. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia. Pendekatan Administratif dan Operasional*. PT. Bumi Aksara. Bandung.
- Siegel S. 1986. *Statistik Non Parametrik untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Terjemahan. PT.Gramedia. Jakarta.
- Soekartawi. 2003. *Agribisnis Teori dan Aplikasinya*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Wahab AS. 1997. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. PT Bumi Aksara. Jakarta.

Tabel 3. Hasil analisis korelasi *Rank Spearman* faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penyuluh dengan kinerja penyuluh di BP3K model *CoE* Kecamatan Batanghari

No	Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penyuluh (X)	Kinerja penyuluh di BP3K model <i>CoE</i> Kecamatan Batanghari (Y)	r_s	Sig (1 tailed)	t-hitung	t-tabel ($\alpha = 0,01$)	Keputusan
1.	Jarak tempat tinggal dengan tempat bertugas	Kinerja penyuluh di BP3K model <i>CoE</i> Kecamatan Batanghari	0,466	0,074	1,579 ⁱⁿ	1,833	Tolak H_1
2.	Tingkat pengalaman penyuluh		0,628	0,019	2,419*	1,833	Terima H_1
3.	Pendapatan penyuluh		0,583	0,030	2,267*	1,833	Terima H_1
4.	Tingkat pendidikan formal penyuluh		0,541	0,043	1,928*	1,833	Terima H_1
5.	Peningkatan kapasitas SDM		0,201	0,276	0,615 ⁱⁿ	1,833	Tolak H_1
6.	Insentif penyuluh		0,002	0,497	0,006 ⁱⁿ	1,833	Tolak H_1